

DEMOKRATISASI DI ACEH: ANALISIS HASIL PILKADA 2006

Effendi Hasan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
Kompellma Darussalam, Banda Aceh 23111
effendihasan@plasa.com

Abstrak

Tulisan ini akan mengkaji tentang demokrasi Aceh; analisis hasil Pilkada 2006. Hipotesis awal kajian ini adalah Pilkada Aceh 2006 telah menjadi contoh implementasi demokrasi bagi Propinsi lain di Indonesia, dengan menempatkan pasangan independen (GAM-SIRA) menjadi Gubernur dan wakil Gubernur Aceh. Pilkada ini juga telah membawa kestabilan politik serta meningkatkan pembangunan demokrasi Aceh pasca konflik.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilu, Pilkada Aceh

Pendahuluan

Setelah Republik Indonesia merdeka, Aceh menjadi salah satu wilayah negara Republik Indonesia. Akan tetapi, keharmonisan tersebut mulai terganggu pada tahun 1953 karena pecahnya gerakan politik yang dipimpin Daud Beureueh, bertujuan mengimplementasi nilai-nilai Islam dalam tatanan bernegara di Aceh. Cita-cita tersebut mendapat tantangan dari Presiden Sukarno, yang pernah berjanji akan memberikan keistimewaan bagi Aceh mengatur dirinya sendiri. Gerakan Daud Beureueh berhasil diselesaikan oleh pemerintah Pusat dengan perjanjian Ikrar Lamteh. Tetapi sepuluh tahun kemudian, Aceh kembali bergolak. Hasan di Tiro pada 4 Desember 1976 memproklamkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk memisahkan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik ini berlangsung selama 30 tahun, sebelum terjadinya tsunami pada 24 Desember 2004.

Tsunami telah menghancurkan Aceh, peristiwa ini telah memaksa pihak yang berkonflik (Indonesia-GAM) menyelesaikan segala permasalahan secara damai di Helsinki. Perundingan ini difasilitasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI),

berlangsung lima tahapan, setiap tahapan berjalan sangat alot. Menurut Nurhasim (2008) dalam konteks penyelesaian konflik politik di Aceh, upaya konsensus normatif sebagai langkah integrasi dimulai ketika persoalan “*self government*” dengan persepsi yang baru pada dasarnya adalah proses integrasi sebagai langkah awal dalam membangun *consensus normative*. Namun langkah-langkah awal ini masih membutuhkan instrumen lain sebagai dasar implementasi dari perjanjian untuk mengakhiri perang. Bentuk-bentuk kompensasi politik seperti amnesti dan kompensasi ekonomi serta peluang dalam proses politik di tingkat lokal dengan adanya partai politik yang didirikan serta dalam proses pemilihan pemimpin Aceh merupakan proses awal dari *consensus normative*. Kedua belah pihak akhirnya berhasil mencapai satu kesepakatan untuk mewujudkan perdamaian di Aceh, dituangkan dalam MoU yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki. Salah satu poin dari MoU Helsinki yang harus segera dirumuskan dan disahkan oleh pemerintah pusat adalah berhubungan dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) demi kelangsungan administrasi pemerintahan Aceh.

Setelah melalui mekanisme sangat aspiratif di Aceh, Rancangan Undang-Undang pemerintah Aceh (UU-PA) ditetapkan menjadi Undang-Undang resmi Pemerintahan Aceh (UU-PA) No 11 tahun 2006 setelah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada 11 Juli 2006. Pasca lahirnya UUPA sebagai Undang-Undang baru pemerintahan Aceh, maka dirumuskan beberapa ketetapan tentang pelaksanaan Pilkada 2006. Pilkada ini bertujuan untuk memilih Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, baik ditingkat propinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota secara langsung.

Selain itu, Pilkada 2006 juga bertujuan untuk membuka kembali kran demokrasi Aceh yang telah tertutup selama 30 tahun, mewujudkan dinamika demokrasi yang lebih transparan, dan kebebasan bersaing dalam politik. Tujuan ini mendapat respon positif dari masyarakat Aceh, terutama lahirnya calon independen dalam Pilkada tersebut. Tidak hanya itu, rakyat Aceh juga memberikan partisipasi yang sangat antusias dalam Pilkada 2006, jumlah presentase yang ikut memilih mencapai 79.9% dari jumlah pemilih di seluruh Aceh. Keinginan serta partisipasi rakyat Aceh membuktikan kesadaran politik rakyat Aceh makin tinggi, mereka semakin memahami mewujudkan sesuatu perubahan melalui jalan demokrasi.

Definisi Konsep

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), demokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan rakyat (Edwar Hymas 1973). Definisi demokrasi yang paling mudah sering diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat atau *government by the people* (J. Roland Pennock 1979). Demokrasi merupakan satu bentuk negara di mana kedaulatan pemerintahan dari rakyat yang dijalankan oleh rakyat atau pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Menurut Robert A. Dahl

(1985) demokrasi merupakan satu sistem yang memberi kesempatan kepada rakyat untuk terlibat langsung dalam pengambilan sesuatu keputusan. C.F. Strong (1972) melihat demokrasi merupakan satu model negara yang berkaitan dengan keinginan serta ketidak inginan rakyat atau masyarakat. Sementara Barry Holden (1974) menjelaskan demokrasi adalah sistem politik di mana seluruh rakyat secara positif atau negatif memberikan hak untuk membuat suatu keputusan yang sangat prinsipil demi kepentingan umum.

Pada abad modern, sistem demokrasi telah menjadi satu sistem politik yang diterima oleh semua elemen bangsa baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Hal ini dapat dilihat sistem demokrasi telah masuk dalam struktur sistem pemerintahan di tingkat daerah sekalipun. Struktur daerah yang paling kecilpun telah dilaksanakan Pemilukada yang merupakan salah satu ciri dari sistem demokrasi. Demokrasi meliputi lima ciri: pertama, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam proses membuat sesuatu keputusan. Kedua, partisipasi warga negara harus mempunyai kesempatan yang mencukupi untuk menyampaikan hak-haknya dalam suatu proses pengambilan keputusan. Ketiga, setiap warga negara mempunyai kesempatan serta peluang yang sama untuk menilai pemerintahan secara logis demi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Keempat, setiap warga negara mempunyai kesempatan untuk mengawal kinerja pemerintahan. Kelima, setiap warga negara mempunyai hak mendapatkan keadilan di depan pengadilan tanpa ada perbedaan antara rakyat biasa dengan elit politik (Dahl, 1985).

Senada dengan Dahl, Afan Gaffar (1999) melihat ciri-ciri penting dari sistem demokrasi pertama, akuntabilitas yaitu tanggungjawab pemerintah kepada rakyat yang memilih mereka, pergantian kekuasaan yang bisa terjadi dengan pelaksanaan

pemilu, rekrutmen politik secara terbuka dalam pemilu yang bebas dan adil. Setiap negara demokrasi mesti melaksanakan pemilihan umum karena ini merupakan ciri mutlak daripada demokrasi. Rakyat diberi hak untuk memilih, bebas menggunakan haknya sesuai dengan pilihan hati nuraninya. Bebas memilih calon pemimpin yang menurutnya sesuai tanpa ada pemaksaan, tidak ada rasa takut, bebas mengikuti kampanye dan melihat proses perhitungan suara dalam pemilihan umum. Kedua, menikmati hak-hak asasi, yaitu hak menyampaikan pendapat (*freedom of expression*), hak berkumpul, berorganisasi (*freedom of assembly*) dan hak kebebasan media (*freedom of the press*).

Kebebasan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu, seperti hak untuk hidup, kebebasan menyampaikan pendapat, memilih secara bebas tanpa ada pemaksaan, kebebasan berorganisasi, kebebasan beragama dan lain sebagainya. Demokrasi merupakan proses otonomi satu wilayah, di mana otonomi memberikan kesempatan kepada satu negara untuk menjalankan demokrasi secara langsung. Itulah yang terjadi diseluruh wilayah Indonesia pasca era reformasi 1998 yaitu pelaksanaan otonomi daerah bertujuan mendekatkan kekuasaan daerah kepada rakyat dengan memberikan ruang secara langsung mengatur dan memimpin daerah masing-masing. Ini dilihat penting karena kekuasaan perlu sejalan dengan kepentingan sesuatu kelompok atau komunitas bagi berjalannya demokrasi disesuatu negara (Romdlon Hidayat, 2008).

Bila kita lihat dalam konteks Aceh, pelaksanaan demokrasi tidak pernah berjalan sempurna terutama pada masa Orde Baru maupun awal era reformasi di Indonesia, disebabkan oleh konflik antara GAM dan pemerintah Indonesia. Konflik ini menyebabkan implementasi demokrasi Aceh berjalan diluar batas-batas ketidakwajaran, seperti adanya pemaksaan kehen-

dak, intimidasi, dan manipulasi suara. Kemunduran demokrasi di Aceh begitu nampak ketika penerapan darurat militer pada 19 Mei 2003. Ribuan TNI/Polri dikirim ke Aceh untuk menumpas GAM, keadaan ini menyebabkan rakyat Aceh selalu dibungkus dengan demokrasi palsu, rakyat apatis terhadap birokrasi pemerintahan. Keadaan ini mengalami perubahan pasca MoU Helsinki 15 Agustus 2005, kran demokrasi mulai terbuka secara bebas bagi rakyat Aceh untuk berpartisipasi dalam politik.

MoU Helsinki menjadi momentum sejarah bagi Aceh, selain menghasilkan kesepakatan menghentikan perang, MoU telah menjadi dasar lahirnya Pilkada 2006 untuk memilih Gubernur, Wakil gubernur, Bupati, Wakil Bupati serta Walikota serta Wakil Walikota secara langsung. Demikian juga, lahirnya calon independen dalam Pilkada tersebut, sehingga membuka kesempatan bagi rakyat biasa dan mantan-mantan anggota GAM untuk mencalonkan diri. Maka tidak berlebihan bila kita katakan Pilkada 2006 di Aceh telah menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia.

Pembahasan

Pilkada 2006 Suatu Analisa

Setelah tsunami 26 Desember 2006, ada tiga peristiwa bersejarah yang menarik untuk dianalisis dalam konteks politik Aceh kontemporer. Pertama, kesepakatan MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan GAM 15 Agustus 2005. Kedua, Pilkada 11 Desember 2006 secara langsung. Ketiga, lahirnya calon independen dalam setiap Pilkada Aceh. Ketiga Peristiwa ini telah menjadi suatu referensi untuk membangun kestabilan politik dan pembangunan demokrasi di Aceh. Menurut Romdlon Hidayat (2008), Aceh merupakan satu-satunya propinsi di Indonesia yang pertama melaksanakan Pilkada 2006 langsung dan membuka kesempatan bagi calon independen untuk mencalonkan diri. Berbeda

dengan Pemilu propinsi lain di Indonesia hanya ada calon dari partai politik.

Perbedaan ini menarik untuk dianalisis, terutama sebelum Pilkada 2006 terdapat survey yang memprediksi calon partai politik akan menguasai panggung politik Aceh, akan survey tersebut tidak terbukti kebenarannya. Calon Partai politik yang notabeneanya mempunyai struktur organisasi politik yang kuat ditolak oleh rakyat Aceh, mereka telah memberi kepercayaan kepada Irwandi-Nazar sebagai pasangan Independen (GAM-SIRA). Pasangan ini berhasil memenangkan Pilkada 2006 di 15 Kabupaten dan Kabupaten Kota dengan jumlah suara 768,745 atau 38.20%.

Sedangkan pasangan dari PPP Ahmad Humam dan Hasbi Abdullah menduduki urutan kedua dengan jumlah 334,484 suara atau 16,62 %. Dari partai Golkar berada pada urutan ketiga dengan jumlah suara 281,174 atau 13,97%. Azwar Abubakar dan Nasir Jamil koalisi PAN dan PKS memperoleh 213,566 suara atau 10,61%, Tamlicha Ali dan Harmen Nuriqman dari partai PBR memperoleh 80,327 suara atau 3,99%. Pasangan independen lainnya, Muhammad Djalil Yusuf dan Syaugas Rahmatillah memperoleh 65,543 suara atau 3,26 %. Iskandar Husein dan Saleh Manaf memperoleh 111,553 suara atau 5,54 %, Ghazali Abbas Adan dan Shalahuddin Al Fata memperoleh suara 156,978 atau 7,80 %.

Kemenangan pasangan independen tidak hanya ditingkat pemilihan Gubernur, akan tetapi untuk pemilihan jabatan Bupati dan Walikota di tingkat Kabupaten/Kota, mereka berhasil mengalahkan calon dari partai politik. Kemenangan ini secara implisit menunjukkan rakyat Aceh ingin melakukan perubahan demi masa depan Aceh yang lebih baik. Partai Golkar, PPP dan beberapa partai lainnya yang merupakan partai terbesar pada masa Orde Baru dan Reformasi ternyata tidak dapat memberikan jawaban kepada pendukungnya karena

calon-calon mereka dikalahkan oleh pasangan Independen.

Kemenangan Irwandi-Nazar telah menunjukkan perubahan drastis dalam dinamika politik Aceh. Kemenangan ini mengangumkan dan dianggap sebagai sejarah terbesar selama Pilkada yang pernah berlangsung di Aceh. Kemenangan tersebut selaras dengan apa yang digambarkan oleh Palmer (1975) setiap Pilkada semua kekuasaan politik bergerak dengan cepat untuk memenuhi ruang publik, elit politik melakukan berbagai strategi supaya ruang-ruang umum dapat dikuasai oleh mereka untuk menarik dukungan dari masyarakat. Inilah yang diperlukan oleh elit politik untuk menarik keinginan masyarakat memberikan dukungan pada saat Pilkada dilaksanakan.

Kemenangan pasangan independen mempunyai kaitan dengan strategi dan konsep kampanye, mereka memberikan harapan kepada rakyat Aceh dalam setiap kampanye politik, berjanji memberi komitmen terhadap pembangunan Aceh secara totalitas, mengkaji kebijakan-kebijakan yang tidak memperdulikan rakyat Aceh. Penjelasan-penjelasan sejarah perjuangan dan kesuksesan GAM semenjak diproklamirkan 4 Desember 1976 sampai ditandatangani MoU Helsinki 15 Agustus 2005, merupakan satu strategi untuk mendapatkan perhatian serta dukungan rakyat Aceh. Tim kampanye pasangan ini selalu menegaskan Irwandi-Nazar mendapat dukungan serta restu dari elit GAM dan pendukungnya.

Selain itu, Pasangan Irwandi-Nazar menggunakan strategi positoning program kampanye berbasis simbol keAcehan, mereka menggunakan platform, bahasa, pakaian, dan tradisi Aceh dalam setiap pemasaran politik. Strategi ini penting dan dilihat sebagai salah satu faktor penentu kemenangan pasangan ini, rakyat Aceh kuat memegang adat serta kebudayaan Aceh. Dalam setiap iklan politik yang disiarkan oleh media elektronik mereka selalu menggunakan bahasa Aceh serta pakaian adat Aceh. Per-

bedaan ini menjadi salah satu makna bagi masyarakat Aceh, karena sebagian besar pasangan lain menggunakan pakaian nasional (Effendi Hasan, 2006).

Visi dan misi juga menjadi perekat kemenangan pasangan ini. Dengan visi mendukung kesejahteraan rakyat, pasangan ini dilihat komitmen membangun masa depan rakyat Aceh yang lebih baik (SWA, 2006). Visi damai, walaupun setiap calon gubernur mempunyai visi ini, tetapi yang paling diingat oleh rakyat adalah sebuah keteladanan, masyarakat telah melihat bukti pasangan independen (GAM-SIRA) mampu membangun perdamaian Aceh. Faktor lain kemenangan pasangan ini dengan memanfaatkan organisasi GAM untuk memasarkan produk politiknya. Kekuatan GAM di Kabupaten-Kabupaten ternyata mampu membawa pesan-pesan politik pasangan ini kepada masyarakat Aceh sehingga berjalan sangat efektif. Termasuk dengan cara-cara pemaksaan dan ancaman untuk memilih pasangan ini dengan modus *operasi fajar subuh* dari rumah kerumah.

Kekalahan calon independen lainnya bukan merupakan sesuatu yang mengejutkan, misalnya pasangan Iskandar Husein-Soleh Manaf tidak pernah diprediksi menang dalam Pilkada 2006. Jumlah suara pasangan ini 111,553 atau 5,54% suara, berada di urutan keenam. Dilihat dari jumlah suara pasangan ini tidak ada satu Kabupatenpun yang mendukung dengan suara mayoritas, fakta ini menjadi bukti mereka tidak mendapat dukungan rakyat Aceh secara keseluruhan. Pasangan Ghazali Abbas-Shalahuddin Alfata mendapat suara 156,978 atau 7.80%, berada di urutan kelima. Ada beberapa Kabupaten pendukung pasangan ini, seperti Kabupaten Pidie dengan jumlah suara 32,734 atau 13.65%, Aceh Utara 25,536 suara atau 10.75%, dan Lhokseumawe 14,526 suara atau 22.13%. Akan tetapi suara ditiga Kabupaten tersebut tidak didukung oleh 18 Kabupaten lain,

menyebabkan pasangan ini harus mengakui kekalahan dari pasangan Irwandi-Nazar.

Jika dianalisis hasil Pilkada 2006, muncul pertanyaan mengapa calon dari partai politik mengalami kekalahan dalam Pilkada tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan calon mereka kalah. Pertama, terkesan sangat sentralistik. Kedua, tidak peduli terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat. Ketiga, tidak lagi mendapat kepercayaan dari rakyat untuk memimpin Aceh. Dukungan rakyat Aceh terhadap partai politik nasional sebelumnya ternyata tidak membawa perubahan positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Rakyat Aceh sangat berpengalaman, mereka telah meragukan komitmen elit partai politik, citra atau kepercayaan kepada mereka semakin hilang dimata rakyat Aceh. Kekalahan calon partai politik nasional dalam Pilkada 2006 juga menunjukkan kegagalan mereka di Aceh (Suara Merdeka, 2006). Partai Golkar yang menempatkan Malik Raden-Sayed Fuad Zakaria sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Hasil Survey awal yang dilakukan oleh LSI membuktikan Golkar akan menjadi pemenang sebanyak 22.3% suara, diikuti oleh Azwar Abubakar 19.6%, Tarmizi A Karim 7.3%, Ahmad Humam Hamid 4.7%, M. Djalil Yusuf 4.2%, Iskandar Husein 3.0%, Tamlicha Ali 1.6%. Akan tetapi hasil Pilkada 2006 menunjukkan hasil yang terbalik dari hasil survey tersebut, calon dari partai politik Golkar dikalahkan oleh calon independen (GAM-SIRA) (Serambi Indonesia, 2006).

Kekalahan calon PPP Humam-Hasbi (H20) membuat penganalisa politik juga kalang kabut. Pasangan ini dari awal dilihat kuat dan mendapat dukungan dari semua Kabupaten. Dengan kekuatan PPP seharusnya organisasi politik berjalan, apalagi Hasbi calon Wakil Gubernur merupakan salah seorang mantan anggota GAM yang mempunyai kekuatan di organisasi GAM. Bahkan elit GAM di Swedia mem-

beri dukungan kepada beliau untuk mencalonkan diri dalam Pilkada Aceh 2006. Kekuatan calon ini terdapat di Kabupaten yang sebelumnya menjadi basis pendukung PPP. Ada dua Kabupaten yang sangat kuat mendukung pasangan ini yaitu Banda Aceh dan Kabupaten Pidie. Di Banda Aceh pasangan PPP ini memperoleh suara berjumlah 14,426 atau 22.01 %, sedangkan di Kabupaten Pidie berjumlah 118,884 atau 49.59. Pasangan dari PPP ini berada di urutan kedua dengan jumlah suara sebanyak 334.484 atau 16.62%.

Kekalahan juga menimpa calon dari partai PAN dan PKS Azwar Abubakar dan Nasir Djamil. Pasangan ini tidak mendapat dukungan yang signifikan, isu kampanye yang mereka angkat berhubungan dengan kesejahteraan dan perdamaian. Dukungan terbesar dari pemilih rasional terutama di kawasan Banda Aceh. Jumlah suara melebihi 20%, berada pada urutan ketiga setelah pasangan dari partai PPP. Untuk Kabupaten Aceh Tengah pasangan ini mendapat suara melebihi 32%, tapi masih kalah dari pasangan partai Golkar. Kelebihan pasangan ini mendapat suara dari setiap Kabupaten di Propinsi Aceh, walaupun mereka harus mengakui kekalahan dari pasangan independen. Bila dibandingkan dengan pasangan Tamlicha dan Djalil Yusuf yang tidak mendapat suara yang signifikan.

Walaupun dari satu segi pasangan dari partai politik mengalami kekalahan pada Pilkada 2006, akan tetapi dari segi lain hasil Pilkada 2006 menunjukkan Aceh telah mempunyai sistem demokrasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Pesta demokrasi 2006 telah membuktikan siapa saja diantara anggota masyarakat dapat menjadi seorang gubernur walaupun tanpa melalui partai politik. Pilkada 2006 telah melahirkan ruang demokrasi yang positif bagi rakyat Aceh untuk memilih pemimpin secara adil dan bebas, dengan tetap menghargai hak-hak masyarakat umum dan berpegang pada

nilai demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pilkada Aceh 2006 telah menjadi simbol untuk mengembalikan hak-hak rakyat Aceh baik dibidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Nilai-nilai demokrasi yang sudah berjalan di Aceh harus dipertahankan terutama pada Pilkada 2011 dengan tetap menjaga prestasi dan kemurniannya. Membangun sistem demokrasi di Aceh harus dimulai dengan membangun kesadaran dari seluruh rakyat Aceh. Demokrasi Aceh tidak dilihat semata-mata berhubungan dengan persoalan Pilkada, akan tetapi ia juga mempunyai kaitan dengan pendistribusian ekonomi dan politik agar masyarakat hidup lebih adil dan sejahtera.

Kesimpulan

Aceh merupakan wilayah pertama di Indonesia yang melaksanakan Pemilihan umum yang berlangsung sangat damai. Pilkada ini telah memberi kesempatan bagi calon independen untuk bersaing dengan calon dari partai politik. Hal ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya yang pernah berlangsung di Aceh. Keberhasilan ini telah menjadikan Aceh sebagai contoh bagi wilayah lain di Indonesia dalam melaksanakan Pilkada dalam ranah demokrasi. Pilkada 2006 telah menjadi manifestasi pelaksanaan ruang demokrasi sesuai dengan Undang-Undang pemerintahan Aceh (UUPA), serta dilindungi oleh Undang-undang dan konstitusi negara Republik Indonesia untuk memilih Gubernur dan Wakil gubernur secara langsung oleh rakyat.

Selain itu, Pilkada 2006 juga telah menunjukkan hasil yang sangat luarbiasa, jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Calon Partai politik tidak dapat mengalahkan dan mempertahankan kekuasaannya di Aceh, mereka dikalahkan oleh pasangan independen (GAM-SIRA). Kemenangan ini merupakan sesuatu prestasi yang sangat istimewa, dan terjadi pertama di wilayah

Republik Indonesia. Sejarah baru telah diukir dengan kemenangan pasangan Irwandi-Nazar sebagai gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2006.

Kemenangan ini sekaligus telah membuktikan rakyat Aceh semakin menyadari fungsi dari demokrasi, mereka telah memberi pilihan sesuai dengan hati nurani masing-masing. Sehingga tidak berlebihan bila dikatakan, Pilkada 2006 telah memperlihatkan beberapa perkara menarik dan telah menghasilkan beberapa perkara baru dalam sejarah politik dan demokrasi di Aceh, diantaranya adalah kemenangan pasangan calon independen (GAM-SIRA) dan kekalahan calon dari partai politik nasional.

Daftar Pustaka

Dahl, Robert A, "Dilema Demokrasi Pluralis Antara Autonomi Dan Kontrol", Rajawali press, Jakarta, 1985.

Effendi Hasan, "Kemenangan Nasionalisme Aceh", Jurnal Aceh institute, 2006

Gaffar, Afan, "Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi", Pustaka pelajar, Yogyakarta, 1999.

Hymas, Edward, "A Dictionary of Modern Revolution", Cet 1, Allen Lane, London, 1973.

Moch, Nurhasim, "Konflik Dan Integrasi Politik", Gerakan Aceh Merdeka, Kajian Tentang Konsensus Normatif Antara RI-GAM Dalam Perundingan Helsinki, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008

Romdlon Hidayat, "Analisa Pilkada Secara Langsung Propinsi Aceh tahun 2006", Bangi, UKM Malaysia, Bangi, 2008.

Palmer, "Election And Political Development The South Asian Experience", University Press, Durham Duke, 1975.

Prihatmoko, Joko, "Pilkada Langsung", Filosofi, Sistem Dan Masalah Pelaksanaan di Indonesia, Unwahas, Semarang, 2005.

Pennock, J, Roland, 1979, "Democratic Political Theory", New York: Priceton University Press, New York, 1979.

Strong, C,F, "Modern Political Constitutions", London Language Books Society, London, 1972.

Holden, Barry, "The Nature Of Democracy", Thomas Nelson and Sons Ltd, Great Britain, 1974 .